

KAJIAN KELEMBAGAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI DALAM PROGRAM KEMITRAAN DI KPHP WAY TERUSAN

Institutional Study of Farmers Group on Partnership Program in KPHP Way Terusan

Elva, Hari Kaskoyo, Indra Gumay Febryano, dan Slamet Budi Yuwono

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
Jln, Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung

ABSTRACT. *KPH is one solution to the problems of degradation and deforestation in almost the forests in Indonesia. However, in its development KPH have constraints in the institutional development of farmer groups that manage land in the areas through partnership programs. Interest of this study was to examine institutional Farmers Group Association (Gapoktan) in KPHP Way Terusan. The data collection was done by interview, and then analyzed descriptively. The results shown that the process of farmer group (KTH) formation was a response from the partnership program so that farmer didn't fully understand the direction and aims of KTH establishment. The implementation of the rules in the form of AD/ART didn't fully done yet because both the board and the members were not involved in the formulation of AD/ART. Farmers believe that the board of KTH able to help the farming development to improve the welfare of the community. Capacity building needs to be done through counseling and training to Gapoktan and farmer groups to become stronger and independent.*

Keywords: rules; institution; forest farmer groups; partnerships

ABSTRAK. KPH merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan degradasi dan deforestasi yang terjadi di hampir seluruh wilayah hutan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya KPH mengalami kendala yaitu pengembangan kelembagaan kelompok tani yang mengelola lahan di wilayahnya melalui program kemitraan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji kelembagaan Gabungan Kelompok Tani di KPHP Way Terusan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terbentuknya KTH merupakan respon dari program kemitraan sehingga masyarakat belum memahami sepenuhnya arah dan tujuan dibentuknya KTH. Implementasi aturan main dalam bentuk AD/ART belum sepenuhnya dilakukan karena baik dari pengurus maupun anggota tidak dilibatkan dalam pembentukan AD/ART. Masyarakat percaya bahwa pengurus KTH dapat membantu mengembangkan usaha tani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan agar Gapoktan maupun kelompok tani menjadi lebih kuat dan mandiri.

Kata kunci: aturan; kelembagaan; kelompok tani hutan; kemitraan

Penulis untuk korespondensi, surel: elva481@gmail.com

PENDAHULUAN

Kondisi hutan di Indonesia telah mengalami degradasi dan deforestasi yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur, pembangunan pertanian dan perkebunan, serta pemukiman. Berdasarkan data FWI (2014) laju kehilangan hutan alam Indonesia adalah sekitar 1,13 juta hektar per tahun dan laju deforestasi di Indonesia pada periode 2009- 2013 adalah sekitar 4,50 juta hektar. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membentuk organisasi di tingkat tapak dalam wujud Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Suwarno *et al.* (2014) menyatakan keberadaan KPH dipandang sebagai persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.

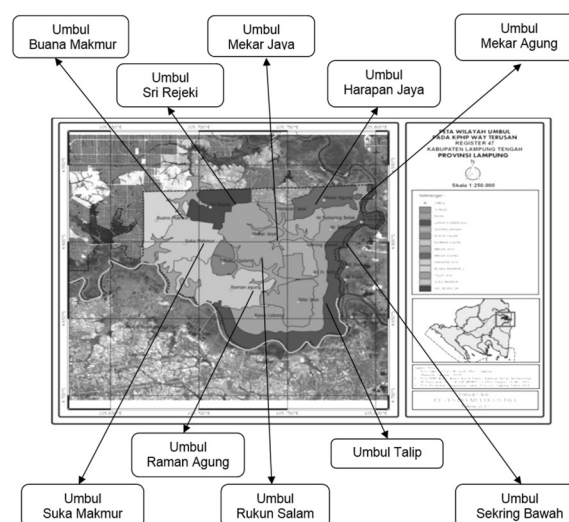
KPHP Way Terusan merupakan salah satu KPHP yang memiliki permasalahan dalam mengimplementasikan pembangunan di wilayahnya, baik dari aspek kelembagaan maupun sosial (Alviya dan Suryandari, 2008). Permasalahan tersebut mengakibatkan pembangunan KPHP Way Terusan tidak dapat berjalan dengan semestinya, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat (Bachtiar & Sanyoto, 2015). Studi yang dilakukan Ichsan dan Febryano (2015) menunjukkan bahwa hak akses masyarakat secara umum sudah tertuang dalam dokumen perencanaan KPH dalam bentuk pengembangan program kemitraan, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat seperti Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat. Menurut Kaskoyo *et al.* (2014) insentif utama bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam program ini adalah untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan negara dan dapat meminimalkan konflik penggunaan lahan.

Kelompok tani berperan sebagai tempat belajar, berdiskusi, bertemu, mencari informasi dan berbagi pengalaman antar anggota kelompok (Ramadoan *et al.*, 2013). Lembaga kemasyarakatan seperti kelompok tani merupakan salah satu wadah yang mengorganisir para petani dalam mengembangkan usahatani. Kelembagaan KTH harus ditata secara formal dan didorong oleh pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurut Ramadhan (2008), kelembagaan masyarakat yang kuat tentu tidak bisa

dengan sendirinya terwujud sehingga diperlukan pendampingan untuk memperkuat kelembagaan petani tersebut. Penataan kelembagaan tersebut sangat penting karena dapat mengatur petani dalam mengelola lahan hutan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di wilayah KPHP Way Terusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-April 2016 yang berada di Umbul Harapan Jaya, Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Umbul merupakan sebutan untuk pemukiman yang berada di dalam hutan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive* dan *random sampling*. Sampel yang diambil secara *purposive* adalah ketua Gapoktan serta ketua, sekretaris dan bendahara KTH. Sampel yang diambil secara *random* adalah sebanyak 36 orang yang mewakili 187 orang anggota KTH berdasarkan formula Slovin (Arikunto, 2011). Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara berupa proses terbentuknya kelompok tani, implementasi aturan kelembagaan yang telah dibuat oleh kelompok tani, dan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus kelompok tani. Data tersebut diwujudkan dalam bentuk tulisan/paparan serta ditransformasi ke dalam bentuk tabel dan diagram.



Gambar 1 Peta kawasan KPHP Way Terusan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah KPHP Way Terusan

KPHP Way Terusan merupakan salah satu KPHP model yang berlokasi di Lampung Tengah. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai KPHP Model melalui beberapa tahapan. Menteri Kehutanan melalui SK Menhut No.316/Menhut/II/2005 tanggal 25 Agustus 2005 telah menunjuk Kawasan Hutan Produksi Register 47 sebagai wilayah KPHP dengan luas \pm 12.500 ha. SK Menhut tersebut ditindak lanjuti oleh Surat Gubernur Lampung No.061/3125/02/2006 tanggal 15 Agustus 2006 untuk membentuk organisasi/lembaga yang disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPHP Way Terusan. Pada perjalanannya ada beberapa permasalahan tenurial yang ada di kawasan KPHP Way Terusan yang menjadi penghambat. Permasalahan tenurial tersebut antara lain adanya tuntutan dari masyarakat untuk mengkonversi lahan pengganti PT BS3. Dasar tuntutan tersebut adalah kondisi lahan sudah bukan berupa hutan dan awalnya bukan berstatus hutan, melainkan areal pengganti PT BS3. Adanya tumpang tindih lahan, dimana sejumlah 300 orang masyarakat (program transmigrasi) ditempatkan dalam areal seluas 350 ha untuk menjadi satuan pemukiman yang ternyata wilayah pemukiman tersebut masuk dalam areal KPHP Way Terusan (Za & Sarjono, 2012).

Awal masuknya masyarakat di wilayah KPHP Way Terusan adalah pada tahun 1985 PT Bumi Sumber Sari Sakti (Gunung Madu Plantation/GMP), mendapat izin penggunaan areal kawasan hutan seluas 10.510 ha untuk penanaman tebu dengan syarat menyiapkan lahan pengganti untuk dihutankan kembali, lahan pengganti tersebut merupakan lahan marga milik masyarakat adat di tiga desa yaitu Desa Surabaya Ilir, Desa Mataram Udik dan Desa Mataram Ilir. Pada tahun 1989, PT Bumi Sekar Aji (BSA) mengajukan permohonan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada Menteri Kehutanan, kemudian mendapatkan izin percobaan penanaman pembangunan HTI pada tahun 1992. Izin yang diberikan seluas 2.500 ha yang letaknya

di wilayah areal KPHP Way Terusan, yaitu wilayah kerja Inhutani V yang berada dalam areal pengganti PT BS3 milik masyarakat adat. Tahun 1992 - 1993 PT BSA mendatangkan orang-orang dari Pulau Jawa dan dari desa sekitar (Desa Gaya Baru) sebagai tenaga kerja untuk penanaman pohon Akasia, Gmelina dan Sengon. Pola yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pola *pesanggem*, yaitu masyarakat diberikan lahan untuk digarap dan perusahaan menitipkan tanaman untuk ditanam dan dirawat (Suciana *et al.*, 2013).

Masyarakat secara bertahap mulai berdatangan ke kawasan KPHP Way Terusan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perebutan lahan garapan, karena masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok kecil dan belum dilakukan pengaturan. Pada tahun 2001, dibangun kesepakatan untuk mengatur permukiman dan lahan garap serta membentuk koordinator-koordinator umbul. Pada awalnya hanya ada tiga koordinator umbul, karena masyarakat terus berdatangan dan menyebar, akhirnya terbentuk sembilan umbul ditambah dengan SP 3 permukiman transmigrasi, maka saat ini terdapat sepuluh umbul. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk semakin meningkat yang ada di Register 47 Way Terusan (Bahtiar & Sanyoto, 2015). Sekitar 4.015 kepala keluarga dengan 15.266 jiwa saat ini telah tinggal di wilayah KPHP Way Terusan. Permasalahan pemukiman dan perladangan di wilayah KPHP Way Terusan menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberhasilan pengelolaan hutan di wilayah tersebut (Za & Sardjono, 2012).

Karakteristik Responden

Responden penelitian ini memiliki rentang usia antara 25 – 76 tahun. Sebagian besar responden berusia antara 36 - 50 tahun sehingga pada usia tersebut masyarakat telah mencapai kematangan pengalaman dalam bertani. Sebanyak 65% responden memiliki tanggungan keluarga berjumlah 0-3 orang. 93% responden bekerja sebagai petani singkong dan karet dan sebagian lainnya bekerja

sebagai tukang kayu, kontraktor, buruh pabrik, dan guru. Pekerjaan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari individu terutama pemenuhan kebutuhan ekonomi individu.

Sebanyak 65% responden mempunyai tingkat pendidikan sekolah dasar. Hal ini mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia di daerah tersebut sehingga kemampuan dalam menerima informasi dan program untuk perubahan sangat sulit diterima oleh masyarakat. Menurut Rizal *et al.* (2012) tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi cara berpikir seseorang dalam menganalisis suatu masalah dan mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan memiliki kecenderungan semakin mudah menerima respon terhadap perubahan-perubahan.

Proses Terbentuknya Kelembagaan Kelompok Tani Hutan di KPHP Way Terusan

KPHP Way Terusan bersama Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI Provinsi Lampung telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal di sepuluh umbul pada wilayah KPHP Way Terusan. Tujuan sosialisasi tersebut untuk mewujudkan pengelolaan hutan produksi yang lestari melalui partisipasi aktif masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui Program Kemitraan yang dilakukan oleh pihak KPHP Way Terusan dengan masyarakat. Beberapa sosialisasi dilakukan sebelum Program Kemitraan tersebut terjalin yaitu sosialisasi tentang Pelatihan Masyarakat Mitra Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (MM-PHPL) pada tanggal 25-26 Mei 2015 yang dilakukan di Badan Diklat Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

Pelatihan MM-PHPL bertujuan untuk memberikan pemahaman kebijakan PHPL kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi. Mitra-PHPL tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan PHPL dari aspek sosial. Sosialisasi yang dilakukan setelah MM-PHPL dan sekaligus sebagai sosialisasi terakhir

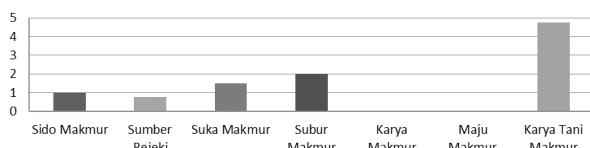
adalah pembekalan penguatan kelembagaan KTH pada tanggal 28-29 Mei 2015. Kegiatan sosialisasi penguatan kelembagaan KTH dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pamong desa dari sepuluh umbul di KPHP Way Terusan, penyuluh pertanian yang berasal dari Badan Penyuluh Pertanian Perikanan Peternakan dan Kehutanan (BP4K) daerah setempat, LSM Kawan Tani, dan instansi terkait yaitu pihak KPHP Way Terusan serta BPHP Wilayah Lampung.

Hermanto (2011) menyatakan bahwa penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pendampingan dan pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, penyuluh pertanian dan instansi terkait dapat membuat kelompok tani yang terbentuk semakin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan dari usahataniannya. Menurut Vittuari *et al.* (2012) lembaga lokal memainkan peran penting dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan karena memberikan dasar untuk tindakan kolektif, membangun konsensus, melakukan kegiatan manajemen terkoordinasi, dan mengumpulkan, menganalisis serta mengevaluasi informasi.

Setelah sosialisasi tersebut, hanya umbul Harapan Jaya yang merespon dengan baik sehingga program kemitraan dilakukan pada umbul Harapan Jaya. Masyarakat harus bergabung dalam kelompok untuk syarat berjalannya program kemitraan. Pembentukan KTH didasarkan pada wilayah tempat tinggal yaitu pada masing-masing Rukun Tetangga (RT). Umbul Harapan Jaya terdiri atas tujuh RT sehingga dibentuk tujuh KTH yaitu Sido Makmur, Sumber Rejeki, Suka Makmur, Subur Makmur, Karya Makmur, Maju Makmur, dan Karya Tani Makmur. Nuryanti dan Swastika (2011) menyatakan saat ini kelompok tani di Indonesia tidak dibentuk atas inisiatif petani dalam memperkuat diri, melainkan kebanyakan merupakan respon dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Program tersebut berupa program bantuan pupuk maupun program kemitraan lainnya yang disalurkan melalui kelompok tani.

Beberapa KTH tersebut dibawah oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Jati Makmur. Gapoktan berfungsi sebagai pendamping dan penghubung antara pemerintah dengan kelompok tani sehingga seluruh bantuan yang datang dari pemerintah disalurkan melalui Gapoktan. Faktanya Gapoktan di wilayah ini belum dapat mengkoordinir KTH yang dibawahinya. Hal tersebut dapat dilihat dari penyaluran bantuan bibit yang berasal dari pemerintah pada bulan Februari 2015, bantuan bibit tersebut tidak terbagi rata di masing-masing KTH.

Program kemitraan kehutanan merupakan salah satu strategi rencana bisnis KPHP Way Terusan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai mitra usaha. Bentuk mitra tersebut berupa demplot tumpang sari tanaman pangan dan tanaman kehutanan yang diterapkan menggunakan pola agroforestri dengan demplot seluas 10 ha. Lahan yang digunakan yaitu lahan milik anggota KTH pada masing-masing kelompok yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Sebaran lahan demplot ketahanan pangan

Pembagian penggunaan lahan demplot berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan pada rapat kelompok. KTH Karya Tani Makmur merupakan kelompok yang memberikan lahan demplot paling luas yaitu 4,75 ha. Hal tersebut karena pengurus KTH dapat meyakinkan anggotanya. Terkait dampak positif dari program kemitraan yaitu sistem pembagian hasil 80% untuk petani dan 20% untuk pemerintah. pembiayaan kegiatan demplot ini dilakukan oleh pihak BPHP dan dibebankan kepada BLUD/APBD/APBN. Pembiayaan yang ditanggung meliputi pembiayaan bibit padi serta pembajakan lahan demplot.

Implementasi Aturan Main dalam Kelompok Tani

Aturan main dalam KTH ditulis secara formal dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga. Pada kenyataannya aturan main tersebut tidak dibuat oleh anggota dan pengurus KTH itu sendiri melainkan difasilitasi oleh LSM Kawan Tani atas permintaan dari BPHP. Akibatnya anggota dan pengurus KTH (56% responden) tidak mengetahui aturan kelompok tani telah diatur dalam AD/ART. Rendahnya tingkat pengetahuan anggota terhadap AD/ART juga karena anggota kurang aktif dalam mengikuti kegiatan dalam kelompoknya. Hal ini terkait dengan mayoritas anggota kelompok tani selain sebagai petani juga bekerja sebagai buruh harian lepas di perusahaan gula yang terletak di sekitar wilayah KPHP Way Terusan.

Implementasi aturan main dalam kelompok seharusnya dilaksanakan sejak AD/ART disahkan. Pada pelaksanaannya aturan main tersebut belum diketahui dan dipahami oleh seluruh anggota KTH. Sebanyak 11% dari responden mengetahui point-point aturan yang diatur dalam AD/ART adalah hanya aturan tentang administrasi organisasi dan 33% dari responden mengetahui aturan di dalam AD/ART berisi tentang administrasi organisasi dan tujuan berdirinya organisasi. Pengurus yang seharusnya sebagai penggerak jalannya organisasi juga masih banyak yang belum mengetahui aturan kelembagaan KTH sehingga sebagian besar dari pengurus belum memahami tentang perannya sebagai pengurus kelompok. Padahal menurut Damanik (2013), unsur fungsi dan tugas pengurus memiliki pengaruh yang kuat terhadap dinamika organisasi.

Sebanyak 57% dari responden pengurus KTH menyatakan perannya belum sesuai dengan peran yang tertulis di AD/ART. Alasannya karena belum pahamnya pengurus terhadap peran yang ada di AD/ART serta belum memiliki rasa tanggungjawab penuh dalam menjalankan amanahnya. Sebagian besar ketua KTH menyatakan perannya belum sesuai AD/ART karena belum memahami tugasnya sebagai ketua sehingga belum dapat menjalankan program kerja secara mandiri. Peran sekretaris KTH belum sesuai karena belum adanya pelatihan tentang administrasi kelompok. Sebagian besar bendahara belum melakukan tugasnya karena belum ada uang

yang dikelola meskipun aturan tentang iuran pokok dan iuran simpanan wajib telah ditetapkan dalam AD/ART. Uphoff (2006) menyatakan ada berbagai alasan mengapa masyarakat lokal memainkan peran yang lebih besar dan efektif dalam pembangunan karena kurangnya pendidikan, pengalaman dan keterampilan.

Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengurus Kelompok Tani

Tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus kelompok tani dapat dilihat dari komunikasi antara pengurus dengan anggota dan sejauh mana informasi yang ada disampaikan kepada anggotanya. Sebanyak 64% anggota kelompok tani percaya terhadap pengurus karena anggota percaya bahwa pengurus dapat membantu mengorganisir kegiatan pertanian, sehingga dapat meningkatkan hasil panen yang optimal. Sebagian anggota tidak memiliki kepercayaan terhadap pengurus karena khawatir pengurus merupakan kaki tangan pihak KPHP Way Terusan terkait keyakinan bahwa KPHP Way Terusan akan mengambil alih tempat tinggal dan lahan yang mereka kelola. mereka sadar bahwa lahannya merupakan milik negara dan suatu saat akan diambil alih oleh negara kembali. Studi yang dilakukan Febryano *et al.* (2014) menunjukkan bahwa tingginya kepercayaan, pemahaman dan kepatuhan dapat dilihat dari dukungan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap aturan-aturan yang telah disepakati dalam pengelolaan sumberdaya hutan; namun, politik di tingkat lokal telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan lokal.

Sebanyak 48% anggota yang berasal dari Kelompok Sido Makmur, Sumber Rejeki dan Karya Tani Makmur mengetahui informasi organisasi dengan baik sehingga pengetahuan anggota pada kelompok ini lebih dari kelompok lainnya. Informasi tersebut disampaikan pada saat rapat kelompok. 52% anggota yang berasal dari KTH Suka Makmur, Subur Makmur, Karya Makmur dan Maju Makmur tidak mengetahui informasi dalam kelompok dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari komunikasi

yang kurang baik antara anggota dengan pengurus kelompok dimana hanya sebagian informasi yang sampai kepada anggota. Sugiyarti *et al* (2015) berpendapat bahwa komunikasi yang terbuka dan kepemimpinan yang adil akan membangun dan mengembangkan tingkat kepercayaan dalam kelompok.

SIMPULAN

Pembentukan kelompok tani di KPHP Way Terusan, khususnya di umbul Harapan Jaya didorong oleh pihak luar yaitu BPHP terkait dengan program kemitraan. Pemilihan pengurus dilakukan melalui penunjukan oleh salah satu pihak sehingga mengakibatkan dinamika di dalam KTH menjadi rendah. Implementasi aturan main belum sepenuhnya dilakukan karena baik dari anggota maupun pengurus tidak dilibatkan dalam pembentukan AD/ART. Tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang terjalin antara pengurus dan anggotanya. Baik dari anggota maupun pengurus kelompok tani harus lebih aktif dalam menjalankan dinamika organisasi serta untuk menjadi lembaga yang kuat dan mandiri perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyuluhan dan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviya, I. & Suryandari, E.Y., 2008, 'Kajian konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Way Terusan Register 47', *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 5 (2), 101—120.
- Arikunto, S., 2011, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bachtiar, I., & Sanyoto, R., 2015. Upaya KPH mengurai sengketa, Kemitraan, Jakarta.
- Damanik, I. K. S., 2013, 'Faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok dan hubungannya dengan kelas kemampuan kelompok tani di Desa Pulo Kencana Kabupaten Serang', *Jurnal Penyuluhan* 5 (1), 31-40.
- Febryano, I. G ., Suharjito, D., Darusman, D.,

- Kusmana, C. & Hidayat, A., 2014, 'The roles and sustainability of local institutions of mangrove management in Pahawang Island', *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 20(2), 1-8.
- Forest Watch Indonesia (FWI), 2014, *Potret keadaan hutan Indonesia periode 2009-2013*. Forest Watch Indonesia, Bogor.
- Hermanto, R., 2011, 'Rancangan kelembagaan petani dalam implementasi prima tani di Sumatera Selatan', *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 5, 110—125.
- Ichsan, A. C. & Febryano, I. G., 2015, 'Penilaian kinerja pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat', *Jurnal Hutan Tropika* 3 (2), 192-198.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A.J. & Inoue, M., 2014, 'Present state of community forestry (Hutan Kemasyarakatan /HKm) program in a protection forest and its challenges: case study in Lampung Province, Indonesia', *Journal of Forest Science* 30(1), 15-29.
- Nuryanti, S. & Swastika, D.K.S., 2011, 'Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian', *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 29(2), 115 – 128.
- Ramadhan, S., 2008, 'Internalisasi sektor kehutanan dalam perencanaan pembangunan wilayah: membumikan rencana sektor dalam pembangunan daerah', *Buletin Planologi* 4 (1), 1—55.
- Ramadoan, S. Muldjono, P. & Pulungan, I., 2013, 'Peran PKSM dalam meningkatkan fungsi kelompok tani dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bima, NTB', *Jurnal Penelitian dan Sosial Ekonomi Kehutanan* 10(3), 199-210.
- Rizal, A. Nurhaedah & Hapsari, E., 2012, 'Kajian strategi optimalisasi pemanfaatan lahan hutan rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 9 (4), 216—228.
- Suciana, D., Gessa, G., Widiyanto, Syaifullah & Arman, M., 2013, KPH, konflik dan REDD: Pembelajaran hasil asesmen konflik tenure di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Working Group Tenure on Forest-Land Tenure, Bogor.
- Sugiyarti, I. Sardi, A. & Mara., 2015, 'Faktor-faktor penyebab hilangnya kepercayaan (*trust*) di KUD Berdikari Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi', *Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis* 18(1), 1—9.
- Suwarno, E. Kartodiharjo, H. Kolopaking, L. M. & Soedomo, S., 2014, 'Institutional obstacles on the development of forest management unit: the case of Indonesian Tasik Besar Serkap', *American Journal of Environmental Protection* 2(2), 41-50.
- Uphoff, N., 2006, Local communities and institutions: realizing their potential for integrated rural development, Cornell University, New York.
- Vittuari, M., Bilali, H. E. & Berjan, S., 2012, 'Territorial governance in rural Bosnia: the role of local institutions and organizations in Sarajevoromanijam Region', *Journal of Central European Agriculture* 13(1), 131-141.
- Za, S. & Sardjono, 2012, 'Laporan assesment dan analisa tenurial untuk mendukung fungsionalisasi KPHP Register 47 Way Terusan di Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung', Working Group of Forest Land Tenure, Lampung.